



BUPATI BLORA
PROPINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 8
TAHUN 2015 PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN BLORA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan keadaan dan agar pengelolaan keuangan Desa dapat berjalan lebih efektif dan efisien serta sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten Blora, Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Blora Nomor 43 tahun 2016 perlu diubah dan disesuaikan.
- b. berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Bupati Blora tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penetapan Desa di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 8 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DI KABUPATEN BLORA.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Blora Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Blora (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 8) yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Blora:

- a. Nomor 29 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2015 Nomor 29);
- b. Nomor 5 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 5);
- c. Nomor 33 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 33);
- d. Nomor 43 Tahun 2016 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 43);

diubah, sehingga berbunyi sebagaimana dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 30 Nopember 2017

BUPATI BLORA,

Cap. ttd

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 30 Nopember 2017

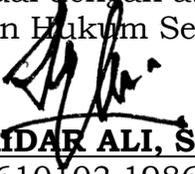
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap. ttd

BONDAN SUKARNO

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2017 NOMOR 55

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


A. KAIDAR ALI, SH. MH.
NIP. 19610103 198608 1 001

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 55 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KELIMA ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 8
TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN DESA
DI KABUPATEN BLORA

FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APBDESA, RENCANA ANGGARAN
BIAYA, BUKU KAS PEMBANTUAN KEGIATAN DAN SURAT PERMINTAAN
PEMBAYARAN SERTA PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA,
PENATAUSAHAAN, LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA
SEMESTER, SERTA LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI
PELAKSANAAN APBDESA, LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
DAN FORMAT LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN
PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

A. FORMAT PERATURAN DESA TENTANG APB Desa

| | |
|---------|-----------------------|
| LAMBANG | PEMERINTAH DESA |
| PEMDES | KECAMATAN |
| | KABUPATEN |

PERATURAN DESA

NOMOR TAHUN.....

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : a. bahwa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat perlu disusun perencanaan pengelolaan keuangan desa;
- b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan desa dapat mencapai hasil yang optimal maka perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b, perlu Menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5.;
6. Dst...

Dengan Kesepakatan Bersama
 BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
 DAN
 KEPALA DESA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a – b) | Rp..... |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan Berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Telah di Evaluasi Camat
a.n. Bupati/walikota

Ditetapkan di
pada tanggal

KEPALA DESA

ttd

ttd

(.....)

.....

Diundangkan di

pada tanggal

SEKRETARIS DESA

ttd

.....

LEMBARAN DESA TAHUNNOMOR.....

LAMPIRAN

PERATURAN DESA
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN
 ANGGARAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH DESA..... TAHUN ANGGARAN.....

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Keterangan |
|---------------|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PENDAPATAN | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | | |
| 1.1.1 | Hasil Usaha | | |
| 1.1.1.1 | Hasil Tanah Bengkok (Tanah lungguh) | | |
| 1.1.1.2 | Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa (Bondo Desa) | | |
| 1.1.1.3 | Bagian Laba BUMDes | | |
| 1.1.2 | Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong | | |
| 1.1.2.1 | Sumbangan tenaga yang diuangkan | | |
| 1.1.2.2 | Sumbangan material yang diuangkan | | |
| 1.1.2.3 | Iuran pembangunan desa | | |
| 1.1.3 | Lain-lain pendapatan asli desa yang sah | | |
| 1.1.3.1 | Sewa bangunan desa | | |
| 1.1.3.2 | Pasar desa | | |
| 1.1.3.3 | Tambatan perahu | | |
| 1.1.3.4 | Bunga Simpanan Uang di Bank | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | |
| 1.2.1 | Dana Desa | | |
| 1.2.2 | Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota | | |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa | | |
| 1.2.4 | Bantuan Provinsi | | |
| 1.2.5 | Bantuan Kabupaten/kota | | |
| 1.3 | Pendapatan Lain-lain | | |
| 1.3.1 | Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | |
| 1.3.2 | Lain-lain pendapatan desa yang sah | | |
| | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | |
| 2 | BELANJA | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2.1.1 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | |
| 2.1.2 | Kegiatan Operasional Kantor Desa | | |
| 2.1.3 | Kegiatan Tunjangan dan Operasional BPD | | |
| 2.1.4 | Kegiatan Insentif RT/RW | | |
| 2.1.5 | Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 2.1.6 | Pembayaran tambahan Tunjangan Penghasilan dari tanah bengkok | | |
| 2.1.7 | Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa | | |
| 2.1.8 | Kegiatan Peningkatan kinerja pengelola keuangan desa | | |
| 2.1.9 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan Musrenbangdesa | | |
| 2.1.10 | Kegiatan peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa | | |
| 2.1.11 | Kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban desa | | |
| 2.1.12 | Kegiatan pengisian perangkat desa | | |
| 2.1.13 | Kegiatan Pemilihan Kepala Desa | | |
| 2.1.14 | Kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa | | |
| 2.1.15 | Kegiatan penghargaan / tali asih untuk kepala desa dan perangkat desa | | |
| 2.1.16 | Kegiatan pelaksanaan lelang tanah kas desa | | |
| 2.1.17 | Kegiatan pengelolaan kekayaan dan aset desa | | |
| 2.1.18 | Kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan | | |
| 2.1.19 | Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar desa | | |
| 2.1.20 | kegiatan pembentukan BPD | | |
| | | | |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 2.2.1 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman dan sarana prasarana transportasi desa | | |
| 2.2.2 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan | | |
| 2.2.3 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan | | |
| 2.2.4 | Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi desa dan pemasaran | | |
| 2.2.5 | Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup | | |
| 2.2.6 | Penyusunan profil desa | | |
| 2.2.7 | Kegiatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Sosial dan keagamaan | | |
| 2.2.8 | Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDesa, dan/atau RKPDesa | | |
| 2.2.9 | Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan wisata yang dikelola desa | | |
| 2.2.10 | Kegiatan Pembangunan Gapura dan tanda batas desa | | |
| 2.2.11 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan ketahanan pangan dan usaha pertanian | | |
| 2.2.12 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil desa | | |
| 2.2.13 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi desa | | |
| 2.2.14 | Pembangunan/rehabilitasi jalan menuju area pertanian/hutan (Jalan Usaha Tani/JUT) | | |
| 2.2.15 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa | | |
| 2.2.16 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa | | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 2.2.17 | Pembangunan/rehabilitasi Balai Desa / Joglo | | |
| 2.2.18 | Pembangunan dan pemeliharaan talud | | |
| 2.2.19 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi | | |
| 2.2.20 | Pengadaan , pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi | | |
| 2.2.21 | Pembangunan sarana olah raga masyarakat | | |
| | | | |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| 2.3.1 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | | |
| 2.3.2 | Pembinaan Seni dan sosial budaya masyarakat | | |
| 2.3.3 | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | |
| 2.3.4 | Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) | | |
| 2.3.5 | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | | |
| 2.3.6 | Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga | | |
| 2.3.7 | Kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat | | |
| 2.3.8 | Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat | | |
| 2.3.9 | Pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan | | |
| 2.3.10 | Perlindungan Perempuan dan anak tingkat desa | | |
| 2.3.11 | Pengembangan taman bacaan dan/atau perpustakaan desa | | |
| | | | |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| 2.4.1 | Pemberdayaan pengolahan hasil usaha produksi pertanian, perikanan dan perdagangan | | |
| 2.4.2 | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | |
| 2.4.3 | Fasilitasi penanggulangan kemiskinan / difabel | | |
| 2.4.4 | Peningkatan Kegotongroyongan masyarakat | | |
| 2.4.5 | Pemberdayaan ekonomi produktif dan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat | | |
| 2.4.6 | Pemberdayaan Perempuan | | |
| 2.4.7 | Pelatihan ketrampilan kepada pemuda putus sekolah | | |
| 2.4.8 | Stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni | | |
| 2.4.9 | Stimulan pembangunan jamban sehat keluarga | | |
| 2.4.10 | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2.4.11 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa | | |
| 2.4.12 | Pengembangan sistem Informasi desa | | |
| 2.4.13 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu | | |
| 2.4.14 | Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana | | |
| 2.4.15 | Pendirian dan Pengembangan BUMDES | | |
| 2.5 | Bidang Tak Terduga | | |
| 2.5.1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | |
| | | | |
| | JUMLAH BELANJA | | |
| | | | |
| | SURPLUS / DEFISIT | | |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|--|--|
| 3 | PEMBIAYAAN | | |
| 3.1 | SILPA | | |
| 3.1.1 | Pencairan Dana Cadangan | | |
| 3.1.2 | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | | |
| 3.1.3 | JUMLAH (Rp) | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | | |
| | JUMLAH (Rp) | | |
| | | | |
| | | | |

Blora, 2017

Disetujui Oleh
KEPALA DESA

(.....)

B. FORMAT RENCANA ANGGARAN BIAYA (RAB)

RENCANA ANGGARAN BIAYA

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

| NO. | URAIAN | VOLUME | HARGA SATUAN (Rp.) | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|--------|--------|--------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| JUMLAH (Rp.) | | | | |

....., tanggal

Disetujui/mengesahkan
Kepala Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Cara pengisian :

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. kolom 1 diisi dengan nomor urut
4. kolom 2 diisi dengan uraian berupa rincian kebutuhan dalam kegiatan.
5. kolom 3 diisi dengan volume dapat berupa jumlah orang/barang.
6. kolom 4 diisi dengan harga satuan yang merupakan besaran untuk membayar orang/barang
7. kolom 5 diisi dengan jumlah perkalian antara kolom 3 dengan kolom 4.

C. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN

BUKU KAS PEMBANTU KEGIATAN
 DESA..... KECAMATAN.....
 TAHUN ANGGARAN.....

1. Bidang :

2. Kegiatan :

| No. | Tangga 1 | Uraian | Penerimaan (Rp.) | | Nomor Bukti | Pengeluaran(Rp.) | | Jumlah Pengembalian ke Bendahara | Saldo Kas (Rp.) |
|-----|-------------|---|-------------------|-----------------------|----------------|-------------------------------|------------------|--|-----------------------|
| | | | Dari Bendahara | Swadaya Masyarakat | | Belanja Barang dan Jasa | Belanja Modal | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | Pindahan Jumlah dari halaman sebelumnya | | | | | | | |
| | | Jumlah | | | | | | | |
| | | Total Penerimaan | | | | Total Pengeluaran | | | |
| | | | | | | Total Pengeluaran + Saldo Kas | | | |

Desa.....,Tanggal.....

Pelaksana Kegiatan

Cara pengisian:

1. Bidang diisi berdasarkan klasifikasi kelompok.
2. Kegiatan diisi sesuai dengan yang ditetapkan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut.
4. Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi.
5. Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi.
6. Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima bendahara.
7. Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah yang diterima dari masyarakat.
8. Kolom 6 diisi dengan nomor bukti transaksi.
9. Kolom 7 diisi dengan jenis pengeluaran belanja barang dan jasa.
10. Kolom 8 diisi dengan jenis pengeluaran belanja modal.
11. Kolom 9 diisi dengan jumlah rupiah yang dikembalikan kepada bendahara.
12. Kolom 10 diisi dengan jumlah saldo kas dalam rupiah.

D. FORMAT SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)

DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

1. Bidang :
2. Kegiatan :
3. Waktu Pelaksanaan :

Rincian Pendanaan :

| NO. | URAIAN | PAGU ANGGARAN | PENCAIRAN S.D. YG LALU | PERMINTAAN SEKARANG | JUMLAH SAMPAI SAAT INI | SISA DANA |
|-----|--------|---------------|------------------------|---------------------|------------------------|-----------|
| | | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) | (Rp.) |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | JUMLAH | | | | | |

....., tanggal

Telah dilakukan verifikasi
Sekretaris Desa

Pelaksana Kegiatan

.....

.....

Setujui untuk dibayarkan
Kepala Desa

Telah dibayar lunas
Bendahara

.....

.....

Petunjuk pengisian:

1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa.
3. Kolom 1 dengan nomorurut.
4. Kolom 2 diisi dengan rincian penggunaan dana sesuai rencana kegiatan.
5. Kolom 3 diisi dengan rincian pagu dana sesuai dengan rencana kegiatan.
6. Kolom 4 diisi dengan rincian jumlah anggaran yang telah dibayar sebelumnya.
7. Kolom 5 diisi dengan rincian yang dimintakan untuk dibayar.
8. Kolom 6 diisi dengan jumlah permintaan dana sampai saat ini.
9. Kolom 7 diisi dengan sisa anggaran.

E. FORMAT PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB BELANJA
DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

- 1. Bidang :
- 2. Kegiatan :

| NO. | PENERIMA | URAIAN | JUMLAH (Rp.) |
|--------------|----------|--------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | | |
| | | | |
| JUMLAH (Rp.) | | | |

Bukti-bukti pengeluaran atau belanja tersebut diatas sebagai terlampir, untuk kelengkapan administrasi dan pemeriksaan sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

....., tanggal

Pelaksana Kegiatan

.....

Cara pengisian:

- 1. Bidang diisi dengan kode rekening berdasarkan klasifikasi kelompok belanja desa.
- 2. Kegiatan diisi dengan kode rekening sesuai dengan urutan kegiatan dalam APBDesa
- 3. Kolom 1 diisi dengan nomor urut
- 4. Kolom 2 diisi dengan penerima pembayaran yang ada di bukti belanja
- 5. Kolom 3 diisi dengan uraian keperluan belanja
- 6. kolom 4 diisi dengan jumlah belanja
- 7. baris jumlah diisi jumlah keseluruhan

F. FORMAT PENATAUSAHAAN

1. Buku Kas Umum

BUKU KAS UMUM
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

| No. | Tgl. | KODE REKENING | URAIAN | PENERIMAAN (Rp.) | PENGELUARAN (Rp.) | NO BUKTI | JUMLAH PENGELUARAN KOMULATIF | SALDO |
|--------|------|---------------|--------|---------------------|----------------------|----------|------------------------------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| JUMLAH | | | | Rp. | Rp. | | | |

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerima kas atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan kode rekening penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan uraian transaksi penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas
- Kolom 6 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas
- Kolom 7 diisi dengan nomor bukti transaksi
- Kolom 8 diisi dengan penjumlahan komulatif pengeluaran kas
- Kolom 9 diisi dengan saldo kas.

Catatan :

sebelum ditandatangani Kepala Desa wajib di periksa dan di paraf oleh Sekretaris Desa.

2. Buku Kas Pembantu Pajak

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

| No. | TANGGAL | URAIAN | PEMOTONGAN (Rp.) | PENYETORAN (Rp.) | SALDO (Rp.) |
|--------|---------|--------|---------------------|---------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| JUMLAH | | | | | |

....., tanggal

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

BENDAHARA DESA,

.....

.....

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut penerimaan atau pengeluaran kas
- Kolom 2 diisi dengan tanggal penerimaan atau pengeluaran kas
- Kolom 3 diisi dengan uraian penerimaan kas atau pengeluaran kas
- Kolom 4 diisi dengan jumlah rupiah penerimaan kas.
- Kolom 5 diisi dengan jumlah rupiah pengeluaran kas.
- Kolom 6 diisi dengan saldo buku kas bendahara.

3. Buku Bank Desa

BUKU BANK DESA
 DESA KECAMATAN
 TAHUN ANGGARAN

BULAN :
 BANK CABANG :
 REK. NO. :

| No. | TANGGAL TRANSAKSI | URAIAN TRANSAKSI | BUKTI TRANSAKSI | PEMASUKAN | | PENGELUARAN | | | SALDO |
|---------------------------|----------------------|---------------------|--------------------|------------------|---------------------|------------------------|----------------|--------------------------------|-------|
| | | | | SETORAN (Rp.) | BUNGA BANK (Rp.) | PENARIKA N (Rp.) | PAJAK (Rp.) | BIAYA ADMINISTRASI (Rp.) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI BULAN INI | | | | | | | | | |
| TOTAL TRANSAKSI KUMULATIF | | | | | | | | | |

MENGETAHUI
 KEPALA DESA,

....., tanggal
 BENDAHARA DESA,

Cara Pengisian :

- Kolom 1 diisi dengan nomor urut pemasukan dan pengeluaran dengan Bank.
- Kolom 2 diisi dengan tanggal transaksi Bank.
- Kolom 3 diisi dengan uraian transaksi pemasukan dan pengeluaran.
- Kolom 4 diisi dengan bukti transaksi.
- Kolom 5 diisi dengan pemasukan jumlah setoran.
- Kolom 6 diisi dengan pemasukan jumlah bunga bank..
- Kolom 7 diisi dengan pengeluaran jumlah penarikan.
- Kolom 8 diisi dengan pengeluaran jumlah pajak.
- Kolom 9 diisi dengan pengeluaran biaya administrasi.
- Kolom 10 diisi dengan saldo Bank.

G. FORMAT LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

1. Laporan Realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Semester Pertama)

LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
SEMESTER PERTAMA
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Keterangan |
|---------------|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PENDAPATAN | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | | |
| 1.1.1 | Hasil Usaha | | |
| 1.1.1.1 | Hasil Tanah Bengkok (Tanah lungguh) | | |
| 1.1.1.2 | Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa (Bondo Desa) | | |
| 1.1.1.3 | Bagian Laba BUMDes | | |
| 1.1.2 | Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong | | |
| 1.1.2.1 | Sumbangan tenaga yang diuangkan | | |
| 1.1.2.2 | Sumbangan material yang diuangkan | | |
| 1.1.2.3 | Iuran pembangunan desa | | |
| 1.1.3 | Lain-lain pendapatan asli desa yang sah | | |
| 1.1.3.1 | Sewa bangunan desa | | |
| 1.1.3.2 | Pasar desa | | |
| 1.1.3.3 | Tambatan perahu | | |
| 1.1.3.4 | Bunga Simpanan Uang di Bank | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | |
| 1.2.1 | Dana Desa | | |
| 1.2.2 | Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota | | |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa | | |
| 1.2.4 | Bantuan Provinsi | | |
| 1.2.5 | Bantuan Kabupaten/kota | | |
| 1.3 | Pendapatan Lain-lain | | |
| 1.3.1 | Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | |
| 1.3.2 | Lain-lain pendapatan desa yang sah | | |
| | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | |
| 2 | BELANJA | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2.1.1 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | |
| 2.1.2 | Kegiatan Operasional Kantor Desa | | |
| 2.1.3 | Kegiatan Tunjangan dan Operasional BPD | | |
| 2.1.4 | Kegiatan Insentif RT/RW | | |
| 2.1.5 | Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 2.1.6 | Pembayaran tambahan Tunjangan Penghasilan dari tanah bengkok | | |
| 2.1.7 | Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa | | |
| 2.1.8 | Kegiatan Peningkatan kinerja pengelola keuangan desa | | |
| 2.1.9 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan Musrenbangdesa | | |
| 2.1.10 | Kegiatan peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa | | |
| 2.1.11 | Kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban desa | | |
| 2.1.12 | Kegiatan pengisian perangkat desa | | |
| 2.1.13 | Kegiatan Pemilihan Kepala Desa | | |
| 2.1.14 | Kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa | | |
| 2.1.15 | Kegiatan penghargaan / tali asih untuk kepala desa dan perangkat desa | | |
| 2.1.16 | Kegiatan pelaksanaan lelang tanah kas desa | | |
| 2.1.17 | Kegiatan pengelolaan kekayaan dan aset desa | | |
| 2.1.18 | Kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan | | |
| 2.1.19 | Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar desa | | |
| 2.1.20 | kegiatan pembentukan BPD | | |
| | | | |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 2.2.1 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman dan sarana prasarana transportasi desa | | |
| 2.2.2 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan | | |
| 2.2.3 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan | | |
| 2.2.4 | Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi desa dan pemasaran | | |
| 2.2.5 | Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup | | |
| 2.2.6 | Penyusunan profil desa | | |
| 2.2.7 | Kegiatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Sosial dan keagamaan | | |
| 2.2.8 | Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDesa, dan/atau RKPDesa | | |
| 2.2.9 | Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan wisata yang dikelola desa | | |
| 2.2.10 | Kegiatan Pembangunan Gapura dan tanda batas desa | | |
| 2.2.11 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan ketahanan pangan dan usaha pertanian | | |
| 2.2.12 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil desa | | |
| 2.2.13 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi desa | | |
| 2.2.14 | Pembangunan/rehabilitasi jalan menuju area pertanian/hutan (Jalan Usaha Tani/JUT) | | |
| 2.2.15 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa | | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 2.2.16 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa | | |
| 2.2.17 | Pembangunan/rehabilitasi Balai Desa / Joglo | | |
| 2.2.18 | Pembangunan dan pemeliharaan talud | | |
| 2.2.19 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi | | |
| 2.2.20 | Pengadaan , pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi | | |
| 2.2.21 | Pembangunan sarana olah raga masyarakat | | |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| 2.3.1 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | | |
| 2.3.2 | Pembinaan Seni dan sosial budaya masyarakat | | |
| 2.3.3 | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | |
| 2.3.4 | Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) | | |
| 2.3.5 | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | | |
| 2.3.6 | Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga | | |
| 2.3.7 | Kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat | | |
| 2.3.8 | Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat | | |
| 2.3.9 | Pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan | | |
| 2.3.10 | Perlindungan Perempuan dan anak tingkat desa | | |
| 2.3.11 | Pengembangan taman bacaan dan/atau perpustakaan desa | | |
| | | | |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| 2.4.1 | Pemberdayaan pengolahan hasil usaha produksi pertanian, perikanan dan perdagangan | | |
| 2.4.2 | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | |
| 2.4.3 | Fasilitasi penanggulangan kemiskinan / difabel | | |
| 2.4.4 | Peningkatan Kegotongroyongan masyarakat | | |
| 2.4.5 | Pemberdayaan ekonomi produktif dan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat | | |
| 2.4.6 | Pemberdayaan Perempuan | | |
| 2.4.7 | Pelatihan ketrampilan kepada pemuda putus sekolah | | |
| 2.4.8 | Stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni | | |
| 2.4.9 | Stimulan pembangunan jamban sehat keluarga | | |
| 2.4.10 | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2.4.11 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa | | |
| 2.4.12 | Pengembangan sistem Informasi desa | | |
| 2.4.13 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu | | |
| 2.4.14 | Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana | | |
| 2.4.15 | Pendirian dan Pengembangan BUMDES | | |
| 2.5 | Bidang Tak Terduga | | |
| 2.5.1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | |
| | | | |
| | JUMLAH BELANJA | | |
| | SURPLUS / DEFISIT | | |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|--|--|
| | | | |
| 3 | PEMBIAYAAN | | |
| 3.1 | SILPA | | |
| 3.1.1 | Pencairan Dana Cadangan | | |
| 3.1.2 | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | | |
| 3.1.3 | JUMLAH (Rp) | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | | |
| | JUMLAH (Rp) | | |
| | | | |
| | | | |

Blora, 2017

Disetujui Oleh
KEPALA DESA

(.....)

2. Laporan Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(Semester Akhir Tahun)

LAPORAN REALISASI
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

SEMESTER AKHIR TAHUN
PEMERINTAH DESA.....
TAHUN ANGGARAN.....

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Keterangan |
|---------------|---|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PENDAPATAN | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | | |
| 1.1.1 | Hasil Usaha | | |
| 1.1.1.1 | Hasil Tanah Bengkok (Tanah lungguh) | | |
| 1.1.1.2 | Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa (Bondo Desa) | | |
| 1.1.1.3 | Bagian Laba BUMDes | | |
| 1.1.2 | Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong | | |
| 1.1.2.1 | Sumbangan tenaga yang diuangkan | | |
| 1.1.2.2 | Sumbangan material yang diuangkan | | |
| 1.1.2.3 | Iuran pembangunan desa | | |
| 1.1.3 | Lain-lain pendapatan asli desa yang sah | | |
| 1.1.3.1 | Sewa bangunan desa | | |
| 1.1.3.2 | Pasar desa | | |
| 1.1.3.3 | Tambatan perahu | | |
| 1.1.3.4 | Bunga Simpanan Uang di Bank | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | |
| 1.2.1 | Dana Desa | | |
| 1.2.2 | Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota | | |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa | | |
| 1.2.4 | Bantuan Provinsi | | |
| 1.2.5 | Bantuan Kabupaten/kota | | |
| 1.3 | Pendapatan Lain-lain | | |
| 1.3.1 | Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | |
| 1.3.2 | Lain-lain pendapatan desa yang sah | | |
| | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | |
| 2 | BELANJA | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2.1.1 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | |
| 2.1.2 | Kegiatan Operasional Kantor Desa | | |
| 2.1.3 | Kegiatan Tunjangan dan Operasional BPD | | |
| 2.1.4 | Kegiatan Insentif RT/RW | | |
| 2.1.5 | Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 2.1.6 | Pembayaran tambahan Tunjangan Penghasilan dari tanah bengkok | | |
| 2.1.7 | Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa | | |
| 2.1.8 | Kegiatan Peningkatan kinerja pengelola keuangan desa | | |
| 2.1.9 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan Musrenbangdesa | | |
| 2.1.10 | Kegiatan peningkatan kinerja aparatur pemerintah desa | | |
| 2.1.11 | Kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban desa | | |
| 2.1.12 | Kegiatan pengisian perangkat desa | | |
| 2.1.13 | Kegiatan Pemilihan Kepala Desa | | |
| 2.1.14 | Kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa | | |
| 2.1.15 | Kegiatan penghargaan / tali asih untuk kepala desa dan perangkat desa | | |
| 2.1.16 | Kegiatan pelaksanaan lelang tanah kas desa | | |
| 2.1.17 | Kegiatan pengelolaan kekayaan dan aset desa | | |
| 2.1.18 | Kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan | | |
| 2.1.19 | Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar desa | | |
| 2.1.20 | kegiatan pembentukan BPD | | |
| | | | |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 2.2.1 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman dan sarana prasarana transportasi desa | | |
| 2.2.2 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan | | |
| 2.2.3 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan | | |
| 2.2.4 | Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi desa dan pemasaran | | |
| 2.2.5 | Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup | | |
| 2.2.6 | Penyusunan profil desa | | |
| 2.2.7 | Kegiatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Sosial dan keagamaan | | |
| 2.2.8 | Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDesa, dan/atau RKPDesa | | |
| 2.2.9 | Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan wisata yang dikelola desa | | |
| 2.2.10 | Kegiatan Pembangunan Gapura dan tanda batas desa | | |
| 2.2.11 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan ketahanan pangan dan usaha pertanian | | |
| 2.2.12 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil desa | | |
| 2.2.13 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi desa | | |
| 2.2.14 | Pembangunan/rehabilitasi jalan menuju area pertanian/hutan (Jalan Usaha Tani/JUT) | | |
| 2.2.15 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa | | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 2.2.16 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa | | |
| 2.2.17 | Pembangunan/rehabilitasi Balai Desa / Joglo | | |
| 2.2.18 | Pembangunan dan pemeliharaan talud | | |
| 2.2.19 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi | | |
| 2.2.20 | Pengadaan , pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi | | |
| 2.2.21 | Pembangunan sarana olah raga masyarakat | | |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| 2.3.1 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | | |
| 2.3.2 | Pembinaan Seni dan sosial budaya masyarakat | | |
| 2.3.3 | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | |
| 2.3.4 | Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) | | |
| 2.3.5 | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | | |
| 2.3.6 | Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga | | |
| 2.3.7 | Kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat | | |
| 2.3.8 | Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat | | |
| 2.3.9 | Pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan | | |
| 2.3.10 | Perlindungan Perempuan dan anak tingkat desa | | |
| 2.3.11 | Pengembangan taman bacaan dan/atau perpustakaan desa | | |
| | | | |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| 2.4.1 | Pemberdayaan pengolahan hasil usaha produksi pertanian, perikanan dan perdagangan | | |
| 2.4.2 | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | |
| 2.4.3 | Fasilitasi penanggulangan kemiskinan / difabel | | |
| 2.4.4 | Peningkatan Kegotongroyongan masyarakat | | |
| 2.4.5 | Pemberdayaan ekonomi produktif dan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat | | |
| 2.4.6 | Pemberdayaan Perempuan | | |
| 2.4.7 | Pelatihan ketrampilan kepada pemuda putus sekolah | | |
| 2.4.8 | Stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni | | |
| 2.4.9 | Stimulan pembangunan jamban sehat keluarga | | |
| 2.4.10 | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2.4.11 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa | | |
| 2.4.12 | Pengembangan sistem Informasi desa | | |
| 2.4.13 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu | | |
| 2.4.14 | Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana | | |
| 2.4.15 | Pendirian dan Pengembangan BUMDES | | |
| 2.5 | Bidang Tak Terduga | | |
| 2.5.1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | |
| | | | |
| | JUMLAH BELANJA | | |
| | SURPLUS / DEFISIT | | |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|--|--|
| 3 | PEMBIAYAAN | | |
| 3.1 | SILPA | | |
| 3.1.1 | Pencairan Dana Cadangan | | |
| 3.1.2 | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | | |
| 3.1.3 | JUMLAH (Rp) | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | | |
| | JUMLAH (Rp) | | |
| | | | |

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)

H. LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN APBDESA

LAMBANG
PEMDES

PEMERINTAH DESA
KECAMATAN
KABUPATEN

RANCANGAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN.....

TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA

- Menimbang : bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa wajib menyusun Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor ...);
6. Dst....

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DAN KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

| | |
|---|------------------|
| 1. Pendapatan Desa | Rp..... |
| 2. Belanja Desa | |
| a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa | Rp..... |
| b. Bidang Pembangunan | Rp..... |
| c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | Rp..... |
| d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat | Rp..... |
| e. Bidang Tak Terduga | <u>Rp.....</u> |
| Jumlah Belanja | <u>Rp.....</u> |
| Surplus/Defisit | Rp..... ===== |
| 3. Pembiayaan Desa | |
| a. Penerimaan Pembiayaan | Rp. |
| b. Pengeluaran Pembiayaan | <u>Rp.</u> |
| Selisih Pembiayaan (a - b) | Rp..... ===== |

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I :Laporan Pertanggungjawaban RealisasiPelaksanaan APBDesaTahun Anggaran
2. Lampiran II : Laporan Program Sektoral dan Program Daerah yang masuk ke desa.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dan berita Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di
Pada tanggal
KEPALA DESA

.....

Diundangkan di
pada tanggal
SEKRETARIS DESA.....

.....

LEMBARAN DESA TAHUNNOMOR.....

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN
APBDesa
PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN.....

| Kode Rekening | Uraian | Anggaran | Keterangan |
|---------------|--|----------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | PENDAPATAN | | |
| 1.1 | Pendapatan Asli Desa | | |
| 1.1.1 | Hasil Usaha | | |
| 1.1.1.1 | Hasil Tanah Bengkok (Tanah lungguh) | | |
| 1.1.1.2 | Hasil Pengelolaan Tanah Kas Desa (Bondo Desa) | | |
| 1.1.1.3 | Bagian Laba BUMDes | | |
| 1.1.2 | Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong | | |
| 1.1.2.1 | Sumbangan tenaga yang diuangkan | | |
| 1.1.2.2 | Sumbangan material yang diuangkan | | |
| 1.1.2.3 | Iuran pembangunan desa | | |
| 1.1.3 | Lain-lain pendapatan asli desa yang sah | | |
| 1.1.3.1 | Sewa bangunan desa | | |
| 1.1.3.2 | Pasar desa | | |
| 1.1.3.3 | Tambatan perahu | | |
| 1.1.3.4 | Bunga Simpanan Uang di Bank | | |
| 1.2 | Pendapatan Transfer | | |
| 1.2.1 | Dana Desa | | |
| 1.2.2 | Bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota | | |
| 1.2.3 | Alokasi Dana Desa | | |
| 1.2.4 | Bantuan Provinsi | | |
| 1.2.5 | Bantuan Kabupaten/kota | | |
| 1.3 | Pendapatan Lain-lain | | |
| 1.3.1 | Hibah dan sumbangan dari pihak ke-3 yang tidak mengikat | | |
| 1.3.2 | Lain-lain pendapatan desa yang sah | | |
| | | | |
| | JUMLAH PENDAPATAN | | |
| | | | |
| 2 | BELANJA | | |
| 2.1 | Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2.1.1 | Pembayaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan | | |
| 2.1.2 | Kegiatan Operasional Kantor Desa | | |
| 2.1.3 | Kegiatan Tunjangan dan Operasional BPD | | |
| 2.1.4 | Kegiatan Insentif RT/RW | | |
| 2.1.5 | Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa | | |
| 2.1.6 | Pembayaran tambahan Tunjangan Penghasilan dari tanah bengkok | | |
| 2.1.7 | Kegiatan penetapan dan penegasan batas desa | | |
| 2.1.8 | Kegiatan Peningkatan kinerja pengelola keuangan desa | | |

| | | | |
|--------|--|--|--|
| 2.1.9 | Kegiatan Penyelenggaraan Musyawarah Desa dan Musrenbangdesa | | |
| 2.1.10 | Kegiatan peningkatan kinerja aparaturn pemerintah desa | | |
| 2.1.11 | Kegiatan penyusunan laporan pertanggungjawaban desa | | |
| 2.1.12 | Kegiatan pengisian perangkat desa | | |
| 2.1.13 | Kegiatan Pemilihan Kepala Desa | | |
| 2.1.14 | Kegiatan peningkatan kualitas pengelolaan arsip desa | | |
| 2.1.15 | Kegiatan penghargaan / tali asih untuk kepala desa dan perangkat desa | | |
| 2.1.16 | Kegiatan pelaksanaan lelang tanah kas desa | | |
| 2.1.17 | Kegiatan pengelolaan kekayaan dan aset desa | | |
| 2.1.18 | Kegiatan peningkatan wawasan kebangsaan | | |
| 2.1.19 | Kegiatan penyelenggaraan kerjasama antar desa | | |
| 2.1.20 | kegiatan pembentukan BPD | | |
| | | | |
| 2.2 | Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa | | |
| 2.2.1 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana lingkungan permukiman dan sarana prasarana transportasi desa | | |
| 2.2.2 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan | | |
| 2.2.3 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan | | |
| 2.2.4 | Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana usaha ekonomi desa dan pemasaran | | |
| 2.2.5 | Penghijauan dan Pelestarian Lingkungan Hidup | | |
| 2.2.6 | Penyusunan profil desa | | |
| 2.2.7 | Kegiatan dan Pembangunan Sarana Prasarana Fisik Sosial dan keagamaan | | |
| 2.2.8 | Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan desa yaitu RPJMDesa, dan/atau RKPDesa | | |
| 2.2.9 | Pengadaan, Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan wisata yang dikelola desa | | |
| 2.2.10 | Kegiatan Pembangunan Gapura dan tanda batas desa | | |
| 2.2.11 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan pengadaan sarana dan prasarana produksi pertanian dan ketahanan pangan dan usaha pertanian | | |
| 2.2.12 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan dan pengadaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil desa | | |
| 2.2.13 | Pengadaan, Pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna untuk kemajuan ekonomi desa | | |
| 2.2.14 | Pembangunan/rehabilitasi jalan menuju area pertanian/hutan (Jalan Usaha Tani/JUT) | | |
| 2.2.15 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan, pemeliharaan sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana alam atau kejadian luar biasa | | |
| 2.2.16 | Pembangunan sarana dan prasarana kantor desa | | |
| 2.2.17 | Pembangunan/rehabilitasi Balai Desa / Joglo | | |
| 2.2.18 | Pembangunan dan pemeliharaan talud | | |
| 2.2.19 | Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana energi | | |

| | | | |
|------------|--|--|--|
| 2.2.20 | Pengadaan , pembangunan pemanfaatan dan pemeliharaan sarana prasarana informasi dan komunikasi | | |
| 2.2.21 | Pembangunan sarana olah raga masyarakat | | |
| | | | |
| 2.3 | Bidang Pembinaan Kemasyarakatan | | |
| 2.3.1 | Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Desa | | |
| 2.3.2 | Pembinaan Seni dan sosial budaya masyarakat | | |
| 2.3.3 | Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) | | |
| 2.3.4 | Kegiatan Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Linmas) | | |
| 2.3.5 | Kegiatan Pembinaan Lembaga Adat | | |
| 2.3.6 | Peningkatan pemberdayaan kesejahteraan keluarga | | |
| 2.3.7 | Kegiatan peningkatan kualitas kesehatan masyarakat | | |
| 2.3.8 | Kegiatan Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat | | |
| 2.3.9 | Pembinaan kehidupan sosial dan keagamaan | | |
| 2.3.10 | Perlindungan Perempuan dan anak tingkat desa | | |
| 2.3.11 | Pengembangan taman bacaan dan/atau perpustakaan desa | | |
| | | | |
| 2.4 | Bidang Pemberdayaan Masyarakat | | |
| 2.4.1 | Pemberdayaan pengolahan hasil usaha produksi pertanian, perikanan dan perdagangan | | |
| 2.4.2 | Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna | | |
| 2.4.3 | Fasilitasi penanggulangan kemiskinan / difabel | | |
| 2.4.4 | Peningkatan Kegotongroyongan masyarakat | | |
| 2.4.5 | Pemberdayaan ekonomi produktif dan pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat | | |
| 2.4.6 | Pemberdayaan Perempuan | | |
| 2.4.7 | Pelatihan ketrampilan kepada pemuda putus sekolah | | |
| 2.4.8 | Stimulan rehabilitasi rumah tidak layak huni | | |
| 2.4.9 | Stimulan pembangunan jamban sehat keluarga | | |
| 2.4.10 | Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa | | |
| 2.4.11 | Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa | | |
| 2.4.12 | Pengembangan sistem Informasi desa | | |
| 2.4.13 | Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pos Pelayanan Terpadu | | |
| 2.4.14 | Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Keluarga Berencana | | |
| 2.4.15 | Pendirian dan Pengembangan BUMDES | | |
| | | | |
| 2.5 | Bidang Tak Terduga | | |
| 2.5.1 | Kegiatan Kejadian Luar Biasa | | |
| | | | |
| | JUMLAH BELANJA | | |
| | SURPLUS / DEFISIT | | |
| | | | |
| | | | |

| | | | |
|------------|-------------------------------------|--|--|
| 3 | PEMBIAYAAN | | |
| 3.1 | SILPA | | |
| 3.1.1 | Pencairan Dana Cadangan | | |
| 3.1.2 | Hasil Kekayaan Desa Yang dipisahkan | | |
| 3.1.3 | JUMLAH (Rp) | | |
| 3.2 | Pengeluaran Pembiayaan | | |
| 3.2.1 | Pembentukan Dana Cadangan | | |
| 3.2.2 | Penyertaan Modal Desa | | |
| | JUMLAH (Rp) | | |
| | | | |

DISETUJUI OLEH
KEPALA DESA

TTD
(.....)

I. FORMAT LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA

LAPORAN KEKAYAAN MILIK DESA
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20...

| URAIAN | TAHUN N (Tahun Periode Pelaporan) | TAHUN N-1 (Tahun Sebelumnya) |
|--|---|------------------------------------|
| I. ASET DESA A. ASET LANCAR 1. Kas Desa a. Uang kas di Bendahara Desa b. Rekening Kas Desa 2. Piutang a. Piutang Sewa Tanah b. Piutang Sewa Gedung c. dst..... 3. Persediaan a. Kertas Segel b. Materai c. dst..... | | |
| JUMLAH ASET LANCAR | | |
| B. ASET TIDAK LANCAR 1. Investasi Permanen -Penyertaan Modal Pemerintah Desa 2. Aset Tetap - Tanah - Peralatan dan Mesin - Gedung dan bangunan - Jalan, Jaringan dan Instalasi - dst..... 3. Dana Cadangan - Dana Cadangan 4. Aset tidak lancar Lainnya | | |
| JUMLAH ASET TIDAK LANCAR | | |
| JUMLAH ASET (A + B) | | |
| II. KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK | | |
| | | |
| JUMLAH KEKAYAAN BERSIH(I – II) | | |
| | | |

TANGGAL

TTD

(KEPALA DESA)

Penjelasan tabel:

1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau perolehan hak lainnya yang sah.
2. Uang kas adalah uang milik Pemerintah Desa, baik yang disimpan di Bendahara Desa maupun di rekening kas desa.
3. Piutang Desa adalah tagihan uang desa kepada pihak yang mengelola kekayaan desa, antara lain berupa tanah, gedung yang diharapkan akan dilunasi dalam waktu paling lama 1 (satu) tahun anggaran sejak ditetapkannya kerjasama tersebut.
4. Persediaan adalah suatu kekayaan berupa barang milik pemerintah desa yang dinilai dengan uang baik berupa uang kertas maupun surat berharga dalam periode normal, antara lain kertas segel, materai, deposito, giro.
5. Aset Desa tidak lancar meliputi penyertaan modal pemerintah desa dan aset tetap milik desa antara lain tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi.
6. Dana cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana yang relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
7. Kewajiban adalah utang yang timbul karena adanya pinjaman oleh Pemerintah.
8. Kekayaan bersih adalah selisih antara aset dan kewajiban pemerintah desa.

Catatan :

Terkait dengan angka 7, bahwa dalam APBDesa khususnya pada pembiayaan tidak dibuka peluang untuk pinjaman.

J. FORMAT LAPORAN PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH
YANG MASUK KE DESA

PROGRAM SEKTORAL DAN PROGRAM DAERAH YANG MASUK KE DESA

Tanggal :
Desa :
Kecamatan :
Kabupaten :

| No. | Jenis Kegiatan | Lokasi Kegiatan | Rincian Kegiatan | Volume | Satuan | Sumber Dana | Jumlah (Rp) |
|------------------------------|----------------|-----------------|------------------|--------|--------|-------------|-------------|
| | | | | | | | |
| Sub Total Jenis Kegiatan (1) | | | | | | | Rp. |
| | | | | | | | |
| Sub Total Jenis Kegiatan (2) | | | | | | | Rp. |
| | | | | | | | |
| Sub Total Jenis Kegiatan (3) | | | | | | | Rp. |
| | | | | | | | |
| Sub Total (4) | | | | | | | Rp. |
| Total (1 s/d 4) | | | | | | | Rp. |

tanggal,

Kepala Desa

(.....)

BUPATI BLORA,

Cap. Ttd

DJOKO NUGROHO

